



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019, diketahui dari laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sektor tersier (sektor jasa) memiliki peningkatan realisasi investasi yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Diketahui, pada tahun 2019 sektor tersier mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar 26,82% yaitu dari Rp366,9 triliun di tahun 2018 menjadi Rp465,3 triliun di tahun 2019. Selain itu, sektor tersier juga merupakan penyumbang realisasi investasi terbesar yaitu sebesar 57,5% dari total realisasi investasi Indonesia di tahun 2019. Berikut ini merupakan tabel perkembangan realisasi investasi tahun 2019:

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia

Sektor	2018	2019	Persentase dari Total Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2019
Primer	Rp132,1 triliun	Rp128,3 triliun	15,8%
Sekunder	Rp222,3 triliun	Rp216,0 triliun	26,7%
Tersier	Rp 366,9 triliun	Rp465,3 triliun	57,5%
Total	Rp721,3 triliun	Rp809,6 triliun	100%

Sumber: Laporan BKPM Republik Indonesia

Laporan BKPM juga menunjukkan bahwa sebanyak Rp234,9 triliun jumlah realisasi investasi sektor tersier berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sebanyak Rp230,4 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah *investor* yang cukup banyak pada sektor tersier. Menurut Weygandt *et al.* (2019), *investor* merupakan salah satu

pengguna laporan keuangan yang menggunakannya untuk membuat keputusan investasi seperti menjual, membeli atau mempertahankan investasinya pada sebuah perusahaan.

Menurut IAI (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2018).

Untuk memastikan kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen yang akan diberikan kepada *investor*, dibutuhkan sebuah verifikasi dari pihak yang independen. Arens *et al.* (2017) menjelaskan pengertian audit sebagai berikut:

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.

Pengertian menurut Arens *et al.* (2017) ini berarti audit merupakan akumulasi dan evaluasi dari bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 200 (2019), tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor

tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Agoes (2018), laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen karena:

- a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
- b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
- c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp25 Milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
- e. SPT yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

Selain alasan-alasan dilakukannya audit yang dijelaskan oleh Agoes (2018), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan perseroan terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Audit dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Pada prakteknya, saat ini banyak tipe dari auditor. Tipe-tipe auditor yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor akuntabilitas pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (audit perpajakan) dan auditor internal. Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis milik perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil dan organisasi non komersial. Hak hukum untuk melakukan audit diberikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh peraturan setiap negara (Arens *et al.* 2017).

Dalam membuat pendapat tentang kemungkinan salah saji material, auditor bertanggung jawab untuk menerapkan pelatihan yang relevan, pengetahuan, serta pengalamannya dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tindakan

yang sesuai dalam situasi perikatan audit (Arens *et al.* 2017). Menurut IAPI (2018) dalam Kerangka Untuk Perikatan Asurans, perikatan asurans berarti suatu perikatan yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Dalam melakukan perikatan audit, perusahaan dapat melakukan perubahan atas auditor yang mengauditnya. Hal ini disebut dengan *auditor switching*. *Auditor switching* merupakan pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh klien perusahaan (Wea dan Murdiawati, 2015).

Dalam melakukan *auditor switching*, perusahaan dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah (*mandatory auditor switching*) atau secara sukarela (*voluntary auditor switching*). Peraturan pemerintah yang mengatur *auditor switching* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis. Berbeda dengan *mandatory auditor switching*, pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) terjadi apabila klien mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien untuk melakukan pergantian auditor (Faradila dan Yahya, 2016).

Salah satu perusahaan jasa yang melakukan pergantian auditor adalah PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL). Sebelumnya, diketahui HEAL akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* pada Mei 2018. Salah satu manfaat dilakukannya *IPO* adalah perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah besar

dan diterima sekaligus dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah dibandingkan perolehan dana melalui perbankan (www.idx.co.id). Ini menunjukkan bahwa *investor* memiliki peranan penting dalam pendanaan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meningkatkan kepercayaan *investor*. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *voluntary auditor switching* untuk mendapatkan auditor dengan kredibilitas yang lebih baik yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini turut dilakukan oleh PT Medikaloka Hermina Tbk.

Diketahui dari prospektusnya, HEAL diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan (*DFK International*) di tahun 2016 kemudian berganti di tahun 2017 menjadi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*) yang tergolong sebagai KAP *big four* yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai hasilnya, pada tanggal 16 Mei 2018, HEAL berhasil melakukan *IPO* dan mendapatkan sejumlah dana dari *investor*. Dalam aksi *IPO*, HEAL menawarkan 351,38 juta saham pada harga Rp3.700 per saham. Dengan demikian, perusahaan memperoleh dana segar sebesar Rp1,3 triliun (Noviani, 2018)

Bertambahnya dana yang dimiliki oleh HEAL akhirnya mendukung HEAL untuk melakukan ekspansi untuk meluaskan bisnisnya. Dikutip dari keterbukaan informasi, emiten dengan kode HEAL itu telah mengeluarkan dana senilai Rp312,5 miliar untuk pembangunan rumah sakit baru dan Rp22,5 miliar untuk pembelian perlengkapan medis. Realisasi tersebut baru sebesar 25% dari rencana bisnis yang ditetapkan perseroan. HEAL juga akan melakukan penambahan rumah sakit baru. HEAL menargetkan akan membangun sebanyak empat unit pada tahun 2018 (Arief,

2018). Perluasan bisnis ini kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh HEAL. Diketahui dari laporan keuangan HEAL, pada tahun 2018, HEAL mengalami pertumbuhan pada penjualannya sebesar 14,18% yaitu dari Rp2.678.197.000.000 di tahun 2017 menjadi Rp3.058.091.000.000 di tahun 2018.

Dari pergantian auditor yang dilakukan oleh HEAL, dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor yang dilakukan ke auditor yang memiliki kredibilitas serta reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan *investor* sehingga bisa meningkatkan dana yang dimiliki perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin dari pendapatannya. Selain PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), perusahaan jasa lainnya yang melakukan pergantian auditor adalah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

Pada 24 April 2018, muncul dugaan kejanggalan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Garuda Indonesia sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT Mahata Aero Terknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai US\$239,94 juta atau sekitar Rp2,98 triliun. Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018 secara mengejutkan maskapai BUMN itu meraih laba bersih sebesar US\$809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (kurs Rp14.000). Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia. Sehingga keduanya enggan menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Kedua komisaris itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas

Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 (Laucereno, 2019).

Tidak dapat diakuinya pendapatan tersebut karena hal ini bertentangan dengan PSAK 23 paragraf 28 dan 29 (cnnindonesia.com). Menurut IAI (2018), pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 29 jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 23 Pasal 29, royalti diakui dengan dasar sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dalam hal ini, pendapatan hanya diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa royalti akan diterima.

Namun, dalam perjanjian Mahata tidak tercantum "*term of payment*" yang jelas bahkan pada saat ini masih dinegosiasikan cara pembayarannya. Mahata hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman satu dari surat Mahata 20 Maret 2019: (cnnindonesia.com)

"Skema dan ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam surat ini dan perjanjian dapat berubah dengan mengacu kepada kemampuan finansial Mahata. Dalam hal ini akan dilakukan perubahan, Mahata akan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tanggal efektif berlakunya skema dan ketentuan pembayaran yang baru".

Kementerian Keuangan menyebut audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan

pihaknya sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Adapun KAP yang mengaudit laporan keuangan GIAA 2018 adalah Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*). "Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku," kata Hadiyanto di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) (Kusuma, 2019).

Sebelumnya, Kemenkeu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Adapun hasil pemeriksaan adalah Kasner Sirumapea (Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018) belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Lalu, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal (Sukarno, 2019).

Ketidaksesuaian pelaksanaan audit dengan standar yang berlaku ini akhirnya memicu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminta Garuda Indonesia melakukan pergantian auditor. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mengirim surat ke dewan komisaris Garuda Indonesia untuk pergantian audit publik dan melakukan audit internal (Fbn, 2019). Selain itu, Gatot Trihargo (Konsultan Kementerian BUMN) menegaskan pihaknya meminta Garuda untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut dengan

menggunakan auditor independen lain. “Kami meminta agar audit interim tersebut dilakukan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda untuk mengetahui kinerja dan *subsequent event*,” kata Gatot (Utami, 2019).

Selain Kementerian BUMN, manajemen baru Garuda Indonesia juga memastikan bahwa Garuda Indonesia akan melakukan pergantian auditor ke KAP *big four*. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) beberapa waktu lalu telah menunjuk Irfan Setiaputra sebagai direktur utama (dirut) dan Triawan Munaf sebagai komisaris utama (komut) maskapai pelat merah itu (Novika, 2020). Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra merespons sejumlah peristiwa yang sempat membelit Garuda Indonesia di kepengurusan sebelumnya. Dalam hal membenahan tata kelola, kata Irfan, manajemen baru Garuda bakal menggunakan auditor berkompeten dalam hal pengawasan laporan keuangan perusahaan. "Garuda sudah memutuskan untuk menggunakan auditor '*Big Four*' yang sangat ketat. Kita sangat siap jika ditemukan hal-hal yang perlu dikoreksi. Kita akan terapkan *Good Corporate Governance (GCG)* sepenuhnya sesuai arahan Pak Menteri (BUMN)" ungkap Irfan Setiaputra (Jannah, 2020).

Dalam kasus Garuda Indonesia yang telah dijabarkan, terlihat bahwa manajemen berpendapat bahwa pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi dapat diakui. Pengakuan pendapatan ini pun disetujui oleh auditor yang membuat auditor tidak melakukan penyesuaian terhadap pendapatan tersebut. Namun, komisaris berpendapat bahwa pengakuan pendapatan tersebut salah dan seharusnya tidak dapat diakui. Ketidaksepakatan antara manajemen dan auditor

dengan komisariss atas kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan ini menyebabkan dilakukannya *voluntary auditor switching*. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan telah menyimpulkan bahwa auditor tidak sanggup bekerja dengan baik sehingga dilakukan *voluntary auditor switching*. Selain disebabkan ketidaksepakatan pada kebijakan akuntansi dan kurangnya kinerja auditor, *voluntary auditor switching* dapat dilakukan perusahaan karena beberapa faktor lainnya yaitu perusahaan yang telah bertumbuh melampaui kemampuan auditor lamanya, perusahaan menginginkan auditor dengan biaya yang lebih rendah, masalah pribadi antara pejabat perusahaan dengan *partner*, peristiwa yang tidak diinginkan seperti *restatement*, konflik kepentingan yang tidak terduga, kemampuan teknologi yang dimiliki KAP, peminimalan risiko litigasi, dan lain-lain.

Selain alasan-alasan yang sudah diungkapkan, perusahaan dapat melakukan *voluntary auditor switching* karena pergantian tersebut membawa beberapa manfaat. Manfaat terbesar yang didapatkan oleh perusahaan dari auditor baru adalah tersedianya wawasan baru dalam bisnis. Manfaat kedua yang paling banyak disebut adalah tersedianya perspektif baru tentang penilaian atas akuntansi yang ada. Manfaat selanjutnya adalah meningkatnya kualitas audit serta pengalaman atas sektor yang lebih baik (KPMG LLP, 2018).

Sampai saat ini, masih terdapat pertanyaan dari berbagai pihak tentang alasan mengapa perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Namun, fakta tentang alasan mengapa perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* tidak pernah diungkapkan di laporan keuangan (Faradila dan Yahya, 2016). Menurut Nazri *et al.* (2012) dalam Faradila dan Yahya (2016), perusahaan selalu

menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantian auditornya. Berdasarkan fakta ini, penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* masih sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh dari *debt to asset ratio*, ukuran KAP, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan persentase perubahan *return on assets* terhadap *voluntary auditor switching*.

Debt to asset ratio mengukur proporsi dari total aset yang dibiayai oleh kreditor perusahaan (Gitman dan Zutter, 2015). *Debt to asset ratio* perusahaan yang tinggi menandakan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak didanai dengan menggunakan utang. Ketika perusahaan memiliki lebih banyak utang, maka *financial risk* perusahaan akan semakin tinggi yang menyebabkan perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini, kepercayaan pengguna laporan keuangan seperti *investor* atau kreditor akan menurun yang menimbulkan keraguan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan. Contoh atas keraguan untuk melakukan kerjasama tersebut adalah kreditor akan enggan untuk meminjamkan dana kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya untuk dapat meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, dengan cara melakukan *voluntary auditor switching* ke auditor dengan reputasi yang lebih baik. Sehingga, perusahaan yang memiliki *debt to asset ratio* yang tinggi cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *debt to asset ratio* terhadap *voluntary auditor switching* menunjukkan hasil yang kontradiktif. Penelitian yang

dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) menunjukkan bahwa *debt to asset ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching* dengan arah yang negatif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) menunjukkan bahwa *debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah ukuran KAP. Menurut Salim (2014) dalam Setyoastuti *et al.* (2020), ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan KAP *big four*, mempunyai cabang dan kliennya merupakan perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan KAP *big four* dan memiliki profesional kurang dari 25 orang (Elder *et al.* 2011 dalam Maryani *et al.* 2016). Menurut Aprianti & Hartaty (2016), KAP di Indonesia yang tergolong sebagai KAP *big four* adalah KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan (berafiliasi dengan *PWC*), KAP Osman Bing Satrio (berafiliasi dengan *Deloitte*), KAP Purwantono, Suherman & Surja (berafiliasi dengan *E&Y*) dan KAP Sidharta & Widjaja (berafiliasi dengan *KPMG*).

Ketika perusahaan pada tahun sebelumnya diaudit oleh KAP kecil atau KAP *non big four*, ini berarti perusahaan diaudit oleh KAP yang memiliki sumber daya serta reputasi yang tidak sebesar KAP *big four*. Sedangkan, perusahaan memiliki banyak *stakeholder* dalam melakukan bisnisnya yang salah satunya adalah pemegang saham. Pemegang saham memiliki peranan penting dalam mendanai

bisnis perusahaan. Karena itu, perusahaan sebisa mungkin akan berusaha mempertahankan pemegang saham agar pemegang saham tidak menjual kepemilikan sahamnya atas perusahaan. Cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pemegang sahamnya adalah dengan meyakinkan pemegang saham bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen yang direpresentasikan dengan laporan keuangan telah dilakukan dengan baik. Keyakinan tersebut diperoleh dengan cara pemberian opini dari pihak yang *reliable* dengan reputasi yang baik yaitu KAP besar atau KAP *big four*. Oleh karena itu, perusahaan yang pada tahun sebelumnya diaudit oleh KAP *non big four* cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching* ke KAP *big four*.

Hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *voluntary auditor switching* juga memiliki hasil yang kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) mengindikasikan bahwa ukuran KAP memiliki efek yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching* dengan arah negatif sedangkan penelitian yang dilakukan Arsih dan Anisykurlillah (2015) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching* adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang terutama disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun direksi berhenti karena kemauan sendiri (Sulistiarini dan Sudarno, 2012 dalam Priyatna, 2015). Dalam

penelitian ini, pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direktur utama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pergantian direktur utama yang dilakukan oleh RUPS dapat disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja direktur lamanya. Oleh karena itu, RUPS mengganti direktur utama perusahaan dengan seseorang yang memiliki kinerja yang lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Karena tuntutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut, direktur utama tentu akan membuat berbagai strategi untuk memenuhinya. Salah satu caranya adalah dengan menambah layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Contohnya adalah dengan menambah pembangkit baru untuk perusahaan energi atau dengan penambahan rute baru pada perusahaan transportasi.

Dalam melakukan penambahan layanan tersebut, tentu dibutuhkan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah pendanaan dari investor. Karena itu, perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan keyakinan dari investor untuk menanamkan modal pada perusahaan. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya, perusahaan akan mengganti auditornya dengan auditor yang memiliki kredibilitas serta reputasi yang tinggi. Oleh karena itu,

perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan *voluntary auditor switching*.

Hasil penelitian mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching* juga memiliki hasil yang kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) menunjukkan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching* dengan arah yang positif. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephanie dan Prabowo (2017) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Selain pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan juga diduga dapat menjadi penyebab dilakukannya *voluntary auditor switching* oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan ukuran seberapa baik perusahaan mempertahankan kondisi finansialnya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam Faradila dan Yahya, 2016). Dalam penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan pertumbuhan penjualan. Siklus penjualan terkait dengan banyak akun seperti penjualan kredit dan tunai, penerimaan kas, *sales return and allowances*, *write-off of uncollectible amounts* serta *bad debt expense*. Pertumbuhan penjualan yang dialami oleh suatu perusahaan mengindikasikan bahwa sedang ada kenaikan kompleksitas atas kegiatan bisnis seperti bertambahnya transaksi, unit bisnis maupun cabang perusahaan.

Karena itu, auditor harus memperluas lingkup auditnya dengan melakukan uji pengendalian yang lebih luas seperti memastikan terdapat pemisahan tugas yang

baik antara petugas penagihan, petugas pencatatan penjualan dan petugas penerimaan kas. Selain itu, auditor juga harus melakukan uji substantif yang lebih dalam seperti memeriksa keterjadian penerimaan kas pada rekening koran perusahaan, melakukan *vouching* penjualan dengan memeriksa jurnal penjualan serta dokumen penjualan dan memeriksa kelengkapan pencatatan atas retur penjualan. Bertambahnya lingkup audit tersebut menandakan bahwa auditor membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan auditnya. Sedangkan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04 Tahun 2016, perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan *voluntary auditor switching* untuk mendapatkan auditor dengan sumber daya yang lebih memadai untuk mempercepat penyelesaian audit sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK dengan tepat waktu. Sehingga, perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan perusahaan cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching*.

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching* juga menunjukkan hasil yang kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching* secara signifikan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprianti dan Hartaty (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching* adalah persentase perubahan *return on assets*. *Return on Assets (ROA)* mengukur efektivitas keseluruhan atas manajemen dalam menghasilkan *profit* dengan aset yang tersedia (Gitman dan Zutter, 2015). Persentase perubahan *ROA (Return on Assets)* merupakan salah satu indikator keuangan perusahaan untuk melihat prospek bisnis perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai persentase perubahan *ROA* yang dihasilkan berarti semakin efektif pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan (Wea dan Murdiawati, 2015).

Selain itu, *ROA* yang meningkat menunjukkan bahwa terdapat peningkatan laba. Laba perusahaan yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada kegiatan operasional maupun jangkauan operasional perusahaan. Contoh peningkatan kegiatan operasional tersebut adalah perluasan layanan 4G ke berbagai wilayah di Indonesia yang dilakukan perusahaan telekomunikasi. Diperluasnya layanan tersebut berarti terdapat penambahan menara telekomunikasi yang disewa oleh perusahaan. Karena itu, auditor harus memperluas lingkup auditnya dengan melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap dokumen perjanjian sewa perusahaan serta melakukan cek fisik lebih dalam untuk memastikan keberadaan aset-aset yang disewa perusahaan untuk menghasilkan labanya.

Namun, aset-aset tersebut tidak hanya terletak di satu daerah melainkan terletak di banyak daerah. Hal ini mengharuskan auditor untuk berangkat ke tempat aset tersebut beroperasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan akan mengganti auditornya dengan auditor yang mampu untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk melakukan audit di luar daerah tersebut. Oleh karena itu,

perusahaan yang memiliki persentase perubahan *return on assets* yang meningkat cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching*.

Penelitian mengenai persentase perubahan *return on assets* masih memiliki hasil yang kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh Kencana *et al.* (2018) menunjukkan bahwa persentase perubahan *ROA* memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Trisnawati (2016) yang menunjukkan bahwa persentase perubahan *ROA* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen pertumbuhan perusahaan yang mengacu pada penelitian Faradila dan Yahya (2016) dan persentase perubahan *return on assets* yang mengacu pada penelitian Kencana *et al.* (2018).
2. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Manto dan Manda (2018) adalah perusahaan jasa sub sektor *real estate* dan *property* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, ditetapkan judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Debt to Asset Ratio*, Ukuran KAP, Pergantian**

Manajemen, Pertumbuhan Perusahaan dan Persentase Perubahan *Return on Asset Terhadap Voluntary Auditor Switching*

1.2 Batasan Masalah

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *voluntary auditor switching* sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio (DTA)*, ukuran KAP, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan persentase perubahan *Return on Asset (ROA)*.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *debt to asset ratio* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
5. Apakah persentase perubahan *return on asset* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *Debt to Asset Ratio (DTA)* terhadap *voluntary auditor switching*.
2. Pengaruh negatif ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Pengaruh positif pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching*.
4. Pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.
5. Pengaruh positif persentase perubahan *Return on Asset (ROA)* terhadap *voluntary auditor switching*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi terkait alasan apa saja yang dipertimbangkan oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

2. Bagi Pemerintah

Untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan terkait *auditor switching* yang telah dibuat oleh pemerintah dengan yang sebenarnya terjadi pada praktiknya.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan pandangan mengenai praktik audit di Indonesia terutama mengenai *voluntary auditor switching*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian mengenai *voluntary auditor switching*.

5. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat berguna sebagai sarana bagi peneliti untuk mendapatkan pengetahuan mengenai praktik audit di Indonesia khususnya mengenai *voluntary auditor switching*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAHLITERATUR

Bab ini membahas mengenai *voluntary auditor switching*, *debt to asset ratio*, ukuran KAP, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, persentase perubahan *return on asset*, hipotesis penelitian dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan

sampel dan teknik analisis data yang berisi statistik deskriptif, uji keseluruhan model, koefisien determinasi, uji kelayakan model regresi, tabel klasifikasi, uji signifikansi simultan dan uji hipotesis yang menggunakan analisis *multivariate* dengan regresi *logistic*.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian, dimulai dari tahap analisis, desain, hingga hasil pengujian hipotesis serta implementasinya, yaitu penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas simpulan, saran serta keterbatasan peneliti